Community Engagement & Emergence Journal
Volume 6 Nomor 3, Tahun 2025
Halaman : 2584-2600

Determinan Kinerja Keuangan Daerah: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

Determinants of Regional Financial Performance: A Study of Regencies and Cities in Central Java

Banar Braian[1], Maria Goretti Kentris Indarti[2]
Manajemen Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Stikubank
[1]banarbraian0008@mhs.unisbank.ac.id, [2]kentris@edu.unisbank.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), Capital Expenditure (BM), and Transfer Revenue (PT) on Regional Financial Performance (KKD), while considering Poverty Rate (TK) and Human Development Index (HDI) as control variables. The research covers 35 regencies/cities in Central Java Province during the 2021–2024 period, using a panel data regression approach. The results indicate that PAD has no significant effect on KKD, suggesting that the contribution of local revenue remains limited due to low fiscal capacity and suboptimal revenue management. In contrast, BM has a positive and significant effect on KKD, emphasizing the role of fixed asset investment in enhancing public service efficiency and driving local economic growth. PT has a negative and significant effect on KKD, indicating that high dependency on central government transfers reduces fiscal independence and discourages local revenue initiatives. TK negatively affects KKD, whereas HDI has a positive influence, highlighting the importance of human capital quality in supporting regional fiscal performance.
Keywords*: Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, Transfer Revenue, Regional Financial Performance, Poverty, Human Development Index.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Pendapatan Transfer (PT) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (KKD), dengan mempertimbangkan Tingkat Kemiskinan (TK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel kontrol. Objek penelitian mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2024, menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap KKD, yang mengindikasikan rendahnya kontribusi pendapatan lokal akibat keterbatasan kapasitas fiskal dan kurang optimalnya pengelolaan. Sebaliknya, BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD, menegaskan pentingnya investasi aset tetap dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. PT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KKD, mengindikasikan bahwa ketergantungan pada dana pusat dapat melemahkan kemandirian fiskal daerah. TK memiliki pengaruh negatif terhadap KKD, sementara IPM menunjukkan pengaruh positif, mencerminkan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kinerja fiskal daerah.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Transfer, Kinerja Keuangan Daerah, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah digunakan sebagai wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara mandiri (UU No.23 Tahun 2014). Pengembangan potensi daerah dalam mengurus urusan pemerintahan merupakan salah satu wujud diberlakukaannya otonomi daerah. Konsep ini

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2025 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. UU ini merupakan hasil dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat (Musyarofah M. G. Kentris Indarti, 2024). UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan langkah maju dalam upaya memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Namun, keberhasilan implementasi UU ini sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan daerah, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah pusat (Winarto & Indarti, 2024).

Pengukuran kinerja penting bagi pemerintah daerah untuk menilai kinerja dalam mencapai tujuan pemerintah daerah. Salah satu cara mengukur kinerja organisasi pemerintah adalah dengan menilai kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan dievaluasi untuk mampu memberikan peringatan dini agar daerah dapat segera melakukan antisipasi. Pemerintah daerah harus mengelola seluruh dana dari sumber manapun untuk menyediakannya pelayanan kepada masyarakat, dan hasil pertanggungjawaban keuangan dibagikan kepada pemangku kepentingan (Rahayu et al., 2023). Ritonga (2016) menyatakan bahwa studi yang dilakukan di Indonesia dan internasional untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas. Sebaliknya, pemangku kepentingan daerah di Indonesia tentu membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi permerintah daerah sebagai pengukur seberapa baik aset yang ada digunakan untuk menghasilkan pendapatan untuk mencapai tujuan organisasi (Liviana et al., 2024). Pengukuran kinerja membantu manajemen untuk memastikan bahwa sumer-sumber input sudah dipakai secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018). Indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran (*EXPenditure)*, dan rasio kemandirian keuangan (Rahayu et al., 2023).

Informasi kinerja yang baik dapat memberikan sinyal kepada pimpinan instasi pemerintah apakah program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian *outcom*e yang diharapkan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien dan efektif. Hal yang tak kalah penting adalah keakuratan informasi keuangan, khususnya pendapatan. Pendapatan merupakan indikator utama yang digunakan sebagai landasan untuk menentukan program pemerintah daerah. Sasaran program, tujuan dan strategi harus dibuat dalam suatu kerangka yang jelas agar dapat secara tepat diukur dan dinilai. Kinerja finansial pada pemda sama dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Secara garis besar, objek pengelolaan keuangan daerah mencakup pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah. Dalam kaitan tersebut, masalah yang dihadapi adalah masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik (Widiatmoko et al., 2023).

Hasil penilaian kondisi keuangan akan menginformasikan apakah daerah tersebut mengalami kesulitan keuangan. Penelitian akuntansi telah dilakukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan/swasta dan perbankan. Bagi pemerintah daerah, hasilnya dapat digunakan untuk membantu mendeteksi tanda-tanda kesulitan keuangan sehingga dapat dicegah untuk meningkatkan pelayanan Masyarakat. Bagi legislatif dan masyarakat, hasil penilaian digunakan untuk mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang hingga saat ini belum dilakukan. (Rahayu et al., 2023)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul "*Local government performance: financial condition perpective"* dilakukan oleh (Rahayu et al., 2023) yang memiliki empat variabel bebas yaitu pendapatan, belanja, posisi operasional, dan struktur utang. Dengan hasil penelitian yaitu pendapatan dan posisi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja dan struktur utang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel independan lain yang juga berhubungan dengan variabel tersebut yaitu Pendapat Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Transfer. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan telah mengungkap beberapa determinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti & Nasution, 2024), (Fatimah Az Zahrah et al., 2024), dan (Lathifa & Haryanto, 2019) menyatakan hasil penelitian yang sama bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian mengenai pendapatan transfer yang dilakukan oleh (Novita & Arza, 2024) dan (Azzahro et al., 2023) menyatakan hasil penelitian yang sama bahwa pendapatan transfer mempunyai pengaruh negative terhadap kinerja keuangan daerah. Mengacu pada rekomendasi dari penelitian sebelumnya untuk menambahkan variabel lain dalam penelitian selanjutnya, yaitu Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel kontrol. Selain itu objek penelitian akan diperluas menjadi 35, sesuai dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sementara penelitian sebelumnya hanya mencakup 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini akan lebih akurat dibandingkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi *research gap* yang ada, mengingat beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda dalam arah hubungan antar variabel meskipun variabel yang digunakan sama. *Research gap* dalam penelitian ini terdapat pada penelitian (Dhea Putri Pratama, Ira Grania Mustika, 2024) dan (Ijtihad & Harsono, 2024) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal pada penelitian (Dhea Putri Pratama, Ira Grania Mustika, 2024) dan (Padang & Padang, 2024) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, serta penelitian (Novita & Arza, 2024) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kineja keuangan daerah. Penelitian mengenai pendapatan transfer oleh (Syaukani et al., 2024) menyatakan bahwa

pendapatan transfer tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, serta pada penelitian (Padang & Padang, 2024) dan (Sofyan & Syaiful Akbar, 2024) yang menyatakan bahwa pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Adanya perbedaan dalam penelitian terdahulu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan. Seperti lokasi penelitian juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil penelitian, mengingat adanya perbedaan budaya organisasi pada masing-masing daerah. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antar penelitian terdahulu terkait determinan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menguji kembali pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, temuan penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan daerah, khususnya keterkaitan antara pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pendapatan trasfer terhadap kinerja keuangan daerah dengan dua variabel kontrol, yaitu tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini juga menggunakan data terbaru, yaitu tahun 2021-2024, sehingga menunjukkan kondisi terkiri dari pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian ini. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas.

2. Tinjauan Pustaka

Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* mendefinisikan kelompok dan individu yang bekerja untuk mencapai tujuan Perusahaan sebagai pemangku kepentingan. Dalam pandangan berbeda, teori *stakeholder* adalah jaringan asosiasi orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, serikat pekerja, kelompok politik, dan bahkan pesaing sekalipun. Menurut teori *stakeholder,* mereka berdampak pada kemajuan dan kegagalan korporasi. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan Perusahaan Perusahaan telah memperoleh keuntungan yang adil dari bisnisnya. (Indarti et al., 2024)

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Defenisi lain menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi (Suparmoko, 2016).

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2021) yang dimaksud dengan kinerja adalah gambaran terkait pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau pun kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini dilakukan baik pada *input* (masukan) program, juga pada *output* (keluaran) serta *outcome* (manfaat) dari program tersebut. Menurut Nordiawan (2010), pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan tersebut, dan yang terpenting apakah tercapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada waktu perencanaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupu Kabupate/Kota, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), APBD ditetapkan dengan Perda sebagai dasar mengelola keuangan daerah selama satu tahun anggaran. APBD merupak instrumen sangat penting dalam mengatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah guna menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. (Santosa, 2024)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Ghozali et al (2008), dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri.

Belanja Modal

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan mendefenisikan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana perimbangan berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa (Santosa, 2024).

Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan survei konsumsi rumah tangga.

Kemiskinan merupakan tantangan ekonomi multiaspek yang membutuhkan berbagai solusi, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemerataan daya beli masyarakat (Amijaya et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial secara keseluruhan di daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator komposit yang menyatukan tiga aspek fundamental dalam mengevaluasi kualitas hidup dan perkembangan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Konsep ini diperkenalkan oleh UNDP dan telah diadopsi secara luas, termasuk di Indonesia, untuk mengukur capaian pembangunan secara menyeluruh. Penggabungan ketiga aspek tersebut dalam satu indeks memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi secara komprehensif capaian pembangunan manusia.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam perspektif teori stakeholder, terdapat keterkaitan yang erat antar Pendapatan Asli Daerhah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD yang dikelola dengan baik tidak hanya berkontribusi pada kinerja keuangan yang postif, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan berbagai stakeholder. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan, yang pada gilirannya akan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta stakeholder lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan Hastuti dan Nasution (2024) serta Pratama et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat keterkaitan yang erat antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan teori stakeholder, belanja modal yang dikelola

dengan baik tidak hanya berkontribusi pada kinerja keuangan yang positif, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan berbagai stakeholder. Dengan meningkatkan belanja modal yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan, yang pada gilirannya akan memenuhi harapan dan kebutuhan Masyarakat serta stakeholder lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa belanja modal mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Ijtihad dan Harsono (2024) serta Natalia dan Suprapto (2024) juga menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan transfer yang dikelola dengan baik tidak hanya berkontribusi pada kinerja keuangan yang positif, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan berbagai pihak sesuai dengan teori stakeholder. Dengan memanfaatkan pendapatan transfer secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan, yang pada gilirannya akan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta stakeholder lainnya. Namun apabila pendapatan transfer berbanding terlalu tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah maka menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, sehingga mengurangi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sofyan dan Akbar (2024), Novita dan Arza (2024), Murhaban et al. (2023), serta Syaukani et al. (2024) menunjukkan bahwa pendapatan transfer berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pendapatan Transfer berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

3. Metode

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian melibatkan teori, desain, hipotesis dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan atau disebut peneliatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupaka datan sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2021-2024 untuk melihat PAD, Belanja Modal, dan Pendapatan Transfer. Sumber penelitian ini melalui akses online djpk.kemenkeu.go.id.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2021-2024. Jumlah sampel sebanyak 35 sampel yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota (35 sampel setiap tahun). Total sampel penelitian ini sebanyak 140 sampel yang menjadi objek penelitian selama 3 (tiga) tahun.

Metode Analisis Data

Alat analisis data yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji analisis regresi data panel, uji estimasi model, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis meliputi Uji T, Uji F, Koefisien Determinasi (R2). Analisis Regresi Data Panel bertujuan untuk mengetahui dampak pengaruh yang diakibatkan oleh interaksi setiap variabel, baik antara variabel dependendan independen serta bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami fluktuasi. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

KKD = $\alpha + \beta_1 PAD + \beta_2$BM + β_3PT + β_4TK+ β_5IPM + e

Keterangan:

KKD : Kinerja Keuangan Daerah
α : Konstanta
β : Koefisien Regresi
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BM : Belanja Modal
PT : Pendapatan Transfer
TK : Tingkat Kemiskinan
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
e : Error

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Referensi	Pengukuran Variabel
Kinerja Keuangan	Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut	Pratama, et al (2024)	Kinerja Keuangan = $\frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} x\ 100\%$
Pendapatan Asli Daerah	sumber keuangan Pemerintah Daerah yang berasal dari internal kawasan daerah tersebut. PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.	Lathifa dan Haryanto (2019)	PAD = Pajak + Retribusi + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah
Belanja Modal	Biaya yang dikeluarkan guna memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Belanja modal dapat berupa belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.	Lathifa dan Haryanto (2019)	BM = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya
Pendapatan Transfer	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah	Santosa (2024)	PT = DBH + DAU + DAK + DID + DD

	dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.		
Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan dihitung dengan cara membandingkan pendapatan atau pengeluaran penduduk dengan sebuah standar yang disebut Garis Kemiskinan (GK).	BPS	Tingkat Kemiskinan = (Jumlah Penduduk Miskin / Total Penduduk) × 100%
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan berdasarkan tiga dimensi utama yang dianggap fundamental untuk kualitas hidup manusia yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak. Kesehatan diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup.	BPS	IPM = $\sqrt[3]{}$(Indeks Kesehatan × Indeks Pendidikan × Indeks Standar Hidup)

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mendeskripsikan sejumlah data yang dipergunakan dipenelitian ini serta memperlihatkan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi masing-masing variabel. Statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik	PAD	BM	PT	TK	IPM	KKD
Mean	482.4789	294.6066	1606.463	10.62493	73.82293	1.003500
Median	402.8800	267.8900	1634.855	10.59500	73.06000	1.003500
Maximum	2885.330	1103.980	2660.610	17.83000	85.72000	1.180000
Minimum	173.9800	75.19000	542.5800	4.030000	66.32000	0.870000
Std. Dev.	383.3926	165.7246	477.8614	3.326854	4.462331	0.046379
Skewness	4.705598	2.624264	-0.607354	0.180794	0.900045	0.129816
Kurtosis	26.44199	12.56621	3.230854	2.285830	3.313033	4.455784
Jarque-Bera	3722.236	694.5132	8.918047	3.737908	19.47349	12.75584
Probability	0.000000	0.000000	0.011574	0.154285	0.000059	0.001699
Sum	67547.05	41168.49	224904.8	1487.490	10335.21	140.4900
Sum Sq. Dev.	20431598	3817585	31740867	1538.446	2767.823	0.299885
Observations	140	140	140	140	140	140

Sumber: data diolah

Menurut Tabel 2 dapat diketahui bahwa tahun 2024 tercatat nilai terendah sebesar 173,98 di Kabupaten Rembang, menurut data Pendapatan Asli Daerah, sedangkan nilai tertinggi tercatat sebesar 2885,33 di Kota Semarang pada tahun 2024. Data Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai standar deviasi 383,3926 dan rata-rata 482,4789.

Menurut data Belanja Modal, Kota Salatiga memiliki nilai terendah pada tahun 2022 sebesar 75,19, dan Kota Semarang memiliki nilai tertinggi sebesar 1103,98 pada tahun 2024. Data Belanja Modal menunjukkan nilai standar deviasi 165,7246 dan rata-rata 294,0606.

Tahun 2022 Kota Magelang memiliki Pendapatan Transfer terendah sebesar 542,58, sedangkan pada tahun 2024 Kabupaten Cilacap memiliki Pendapatan Transfer

terbesar sebesar 2660,61. Data Pendapatan Transfer memliki nilai standar deviasi 477,8614 dan rata-rata 1606,463.

Rata-rata rasio Tingkat Kemiskinan sebesar 10,62493% dengan nilai standar deviasi 3,326854%. Pada tahun 2024, Kota Semarang memiliki Tingkat Kemiskinan terendah yaitu 4,03%, sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Kebumen memiliki Tingkat Kemiskinan tertinggi yaitu 17,83%.

Kabupaten Brebes pada tahun 2021 memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia terendah dengan nilai 66,32, sedangkan Kota Salatiga pada tahun 2024 memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dengan nilai 85,72. Data Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai standar deviasi 4,462331 dan rata-rata nilai 73,82293.

Data Kinerja Keuangan Daerah menunjukkan nilai standar deviasi 0,046379 dan nilai rata-rata sebesar 1,003500. Tahun 2021, Kabupaten Kudus memiliki nilai capaian Kinerja Keuangan Daerah terendah sebesar 0,87, sedangkan Kota Surakarta memiliki nilai tertinggi sebesar 1,18 pada tahun 2024.

Hasil Uji Model

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, diawali dengan pemilihan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini, Langkah awalnya adalah pemilihan model terbaik yang akan dipakai dalam penelitian. Estimasi model data panel terdiri dari 3 (tiga) teknik model yang digunakan yaitu: *Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM)*. Penentuan pemilihan model terbaik dilakukan uji estimasi model dengan menggunakan 3 cara yaitu: Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM Breunch-Pagan. Hasil pengujan estimasi model dijelaskan pada table berikut:

Uji Chow

Uji chow digunakan guna mengetahui model mana yang lebih baik, antara *Common Effect Model (CEM)* dengan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.668481	(34,100)	0.0001
Cross-section Chi-square	90.395188	34	0.0000

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil Uji Chow nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa modelnyang tepat adalah Fixed Effects Model (FEM).

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menemukan model mana yang lebih optimal antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM).

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	64.770285	5	0.0000

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji hausman persamaan 1 yang ditunjukkan pada Tabel 3 diperoleh nilai prob. dari cross section random sebesar 0.0000 (<0.05), sehingga secara statistic H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka model estimasi yang tepat digunakan pada regresi data panel persamaan 1 adalah *Fixed Effect Model (FEM).*

Hasil uji Chow model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM),* dan dari hasil Uji Hausman model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM).* Artinya terdapat kesamaan hasil antara uji chow dan uji hausman, sehingga tidak diperlukan lagi uji *Largrange Multiplier – The Breunsch Pagan.*

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji Multiolinearitas dipergunakan untuk mengevaluasi keberadaan korelasi yang signifikan antara variabel independent dalam model regresi. Pada model regresi yang baik, tidak ada hubungan antara variabel bebas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	BM	PT	TK	IPM
PAD	1.000000	0.847017	0.261279	-0.316159	0.400222
BM	0.847017	1.000000	0.436749	-0.110196	0.175837
PT	0.261279	0.436749	1.000000	0.461501	-0.495803
TK	-0.316159	-0.110196	0.461501	1.000000	-0.705271
IPM	0.400222	0.175837	-0.495803	-0.705271	1.000000

Sumber: data diolah

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi PAD dan BM sebesar 0,847017<0,85, PAD dan PT sebesar 0,261279<0,85, PAD dan TK sebesar -0,316159<0,85, PAD dan IPM sebesar 0,400222<0,85, BM dan PT 0,436749<0,85, BM dan TK sebesar -0,110196, BM dan IPM sebesar 0,175837<0,85, PT dan TK sebesar 0,461501<0,85, PT dan IPM sebesar -0,495803<0,85, TK dan IPM -0,705271<0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tidak ada hubungan antara variabel inpenden, sehinga dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskesatisitas memiliki tujuan guna memeriksa apakah ada variasi yang tidak konsisten dari residual antara satu observasi dengan observasi lain dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji Glejser digunakan untuk menguji heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.232091	0.594744	0.390237	0.6972
BM	-8.73E-05	4.45E-05	-1.959736	0.0528
IPM	-0.002116	0.006983	-0.303085	0.7625
PAD	-4.74E-06	5.00E-05	-0.094752	0.9247
PT	-7.50E-06	3.35E-05	-0.223886	0.8233
TK	-0.000477	0.009567	-0.049910	0.9603

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada persamaan 1 pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa, seluruh variabel menunjukkan nilai probabilitas >0,05. Karena itu, dalam model penelitian ini tidak ada bukti adanya heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pendekatan model regresi data panel dengan Eviews berupa *Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM),* dan *Random Effect Model (REM)* melalui uji yang telah dilakukan (uji chow, uji hausman, dan uji LM) menunjukkan bahwa model regresi yang lebih tepat dipergunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.660401	0.765901	0.862253	0.3906
PAD	-2.49E-05	6.44E-05	-0.386772	0.6997
BM	0.000453	5.73E-05	7.903273	0.0000
PT	-0.000146	4.31E-05	-3.395460	0.0010
TK	-0.031479	0.012320	-2.555074	0.0121
IPM	0.010723	0.008992	1.192425	0.2359
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.584828	Mean dependent var		1.003500
Adjusted R-squared	0.422911	S.D. dependent var		0.046379
S.E. of regression	0.035232	Akaike info criterion		-3.618761
Sum squared resid	0.124130	Schwarz criterion		-2.778292
Log likelihood	293.3133	Hannan-Quinn criter.		-3.277220
F-statistic	3.611900	Durbin-Watson stat		2.354688
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi memiliki tujuan mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi data panel diperoleh nilai R Square sebesar 0,584828 atau 58,48%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari PAD, BM, dan PT, serta variabel kontrol yang terdiri dari TK dan IPM mampu menjelaskan variabel KKD sebesar 58,48%, sedangkan sisanya 41,52% (100%-nilai R-squared) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji F

Uji F dipergunakan untuk megetahui sebearapa pengaruh semua variabel independen secara keseluruhan dalam mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi data panel nilai sig. 0,000000<0,05. Artinya variabel PAD, BM, PT, TK, dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Uji Hipotesis (t)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hipotesis pertama ditolak karena hasil uji menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -2,49E-05 dan nilai signifikansi sebesar 0,6997 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama tidak dapat diterima.

Pada pengujian hipotesis kedua, diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,000453 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 (< 0,05). Dengan demikian, hipotesis kedua diterima, yang berarti bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil uji-t terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk Pertumbuhan Ekonomi (PT) adalah 0,0010 (< 0,05) dengan koefisien beta sebesar -0,000146. Artinya, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Pada pengujian variabel kontrol Tingkat Kemiskinan (TK), diperoleh koefisien beta sebesar -0,031479 dan nilai signifikansi sebesar 0,0121 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Sementara itu, pada variabel kontrol Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperoleh koefisien beta sebesar 0,010723 dan nilai signifikansi sebesar 0,2359 (> 0,05). Artinya, IPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Meskipun demikian, keberadaan IPM tetap penting untuk menjaga validitas model, karena IPM berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola keuangan daerah. Tidak signifikannya IPM secara statistik tidak serta-merta menandakan bahwa variabel ini tidak relevan secara teoritis.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Sesuai dengan teori Stakeholder, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan, kontribusinya terhadap keseluruhan kinerja keuangan masih relatif kecil dibandingkan dengan total belanja dan transfer yang diterima. Hal ini

dapat terjadi karena struktur PAD di banyak kabupaten/kota masih didominasi oleh sektor-sektor dengan potensi pendapatan terbatas, atau mekanisme pungutan pajak dan retribusi daerah yang belum optimal.

Selain itu, dalam kerangka teori Otonomi Daerah, fakta bahwa PAD tidak signifikan menunjukkan bahwa tujuan otonomi fiskal, yaitu kemandirian keuangan daerah, belum sepenuhnya tercapai. Sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah masih bergantung pada pendapatan transfer untuk membiayai operasional dan pembangunan, sehingga PAD belum menjadi instrumen penopang utama bagi kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan kebijakan pengelolaan PAD, inovasi sumber pendapatan baru, serta penegakan kepatuhan pajak dan retribusi agar PAD dapat benar-benar berkontribusi signifikan pada perbaikan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan atau peningkatan aset tetap yang bermanfaat lebih dari satu periode anggaran, seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung publik, dan fasilitas umum lainnya. Dalam kerangka teori Stakeholder, belanja modal adalah upaya pemerintah daerah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terkait sarana dan prasarana publik. Stakeholder seperti masyarakat pengguna infrastruktur, pelaku usaha, dan investor menuntut ketersediaan fasilitas publik yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Berdasarkan teori Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, termasuk dalam pengelolaan belanja pembangunan. Dengan pengelolaan belanja modal yang efektif dan terarah, pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses ekonomi, dan merangsang pertumbuhan investasi lokal. Hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penguatan posisi keuangan daerah secara keseluruhan. Belanja modal yang tepat sasaran juga meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung prinsip akuntabilitas publik, sebagaimana dijelaskan Mardiasmo (2018) dalam teori kinerja sektor publik.

Pengaruh Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dalam perspektif teori Stakeholder, pendapatan transfer memang berfungsi untuk membantu daerah mendanai kebutuhan dasar, mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, dan menjaga stabilitas pembangunan. Namun, dominasi pendapatan transfer yang terlalu tinggi menimbulkan moral hazard, yaitu menurunnya motivasi daerah untuk menggali potensi PAD secara optimal. Ketergantungan fiskal ini juga melemahkan prinsip *local accountability* karena sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari pusat, bukan hasil kontribusi masyarakat lokal.

Hal ini bertentangan dengan semangat Otonomi Daerah yang menuntut kemandirian fiskal. Sesuai dengan penjelasan Suparmoko (2016) dan Halim (2019), idealnya pemerintah daerah mampu mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan dari PAD dan pendapatan sah lainnya. Ketergantungan berlebihan pada transfer pusat justru menandakan lemahnya kemandirian daerah. Secara praktis, transfer yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penguatan PAD berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penggunaan anggaran. Ketergantungan tersebut menghambat

inovasi pengelolaan pendapatan lokal dan menurunkan akuntabilitas pengeluaran daerah.

Pengaruh Variabel Kontrol: Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori Stakeholder bahwa tingginya angka kemiskinan meningkatkan beban pengeluaran pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan, subsidi kesehatan, dan bantuan sosial, sehingga menekan kapasitas belanja pembangunan produktif. Hal ini juga sesuai dengan teori Otonomi Daerah yang menekankan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir. Tingginya angka kemiskinan menjadi beban pengeluaran sosial yang signifikan, menguras belanja daerah untuk program bantuan sosial, subsidi kesehatan, dan pendidikan dasar.

Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. IPM yang tinggi menandakan kualitas sumber daya manusia yang baik, yang mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Teori Stakeholder menjelaskan bahwa kualitas SDM yang baik memperkuat daya saing daerah dan memperbaiki persepsi investor, sehingga meningkatkan potensi pendapatan daerah. Sejalan dengan kajian Muzzakar et al., (2023), IPM berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan**.**

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Pendapatan Transfer (PT) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (KKD), dengan mempertimbangkan Tingkat Kemiskinan (TK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel kontrol. Objek penelitian mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2021–2024, dengan pendekatan analisis regresi data panel.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi PAD terhadap kinerja fiskal daerah masih terbatas, yang dapat disebabkan oleh kapasitas fiskal daerah yang rendah dan kurang optimalnya pengelolaan pendapatan lokal. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini menegaskan bahwa investasi dalam bentuk belanja aset tetap memiliki dampak langsung dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pendapatan Transfer (PT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang tinggi menurunkan kemandirian fiskal dan menekan inisiatif daerah dalam menggali sumber pendapatan asli. Tingkat Kemiskinan (TK) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar beban sosial yang harus ditanggung oleh daerah, sehingga mengurangi efektivitas belanja pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi cenderung memiliki kinerja fiskal yang lebih baik karena mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan data sekunder dari laporan keuangan daerah dan BPS yang belum mencakup faktor kualitatif seperti tata kelola atau transparansi, serta keterbatasan variabel yang dianalisis, yaitu hanya meliputi PAD, Belanja Modal, Pendapatan Transfer, Tingkat Kemiskinan, dan IPM. Selain itu, penelitian ini terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2024, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel yang relevan, memperluas wilayah kajian hingga antar provinsi atau pulau, serta memperpanjang periode pengamatan guna memperoleh gambaran kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif.

6. Daftar Pustaka

Azzahro, N. A., Murhaban, M., Ikhyanuddin, I., & Nurhasanah, N. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, *2*(4), 577–591. https://doi.org/10.29103/jam.v%vi%i.11284

Dhea Putri Pratama, Ira Grania Mustika, A. P. K. (2024). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2022. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, *8*(4), 720–732. https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1609

Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, & Salma Putri Mellinia. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(1), 369–384. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422

Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *24*(2), 157–170. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/21423

Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ganec Swara*, *18*(1), 41–50. http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA%0AJurnal

Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, *8*(2), 1–10. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Liviana, A., Widiatmoko, J., & Indarti, M. G. K. (2024). Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(1), 1595–1617.

Musyarofah M. G. Kentris Indarti. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, *14*(1), 219–239. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v14i1.2143

Muzzakar, K., Syahnur, S., & Abrar, M. (2023). Provincial Real Economic Growth in Indonesia: Investigating Key Factors Through Spatial Analysis. *Ekonomikalia*

Journal of Economics, *1*(2), 40–50. https://doi.org/10.60084/eje.v1i2.66

Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *6*(1), 430–443. https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367

Padang, N. N., & Padang, W. S. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Belanja Modal Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, *10*(1), 73–86. https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3524

Rahayu, S., Yudi, Y., & Rahayu, R. (2023). Local government performance: financial condition perspective. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *10*(6), 395–408. https://doi.org/10.22437/ppd.v10i6.11779

Sofyan, A., & Syaiful Akbar, F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pembiayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(3), 1276–1287. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.862

Syaukani, A., Khariry, M., & Asmawatiy, C. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan. *ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN*, *8*(1), 81–93. https://doi.org/10.56662/administraus.v8i1.215

Widiatmoko, J., Indarti, M. G. K., & Nuswandari, C. (2023). Accounting Conservatism: Antecedents and Consequence in Indonesia Manufacturing Companies. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, *20*, 2315–2325. https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.199

Winarto, J. S., & Indarti, M. G. K. (2024). Capital Expenditure : Antecedents and Its Impact on Economic Growth. *IJEDR*, *5*(3), 993–1011.